

# LAPORAN

## TEKNIK DAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN

TAHUN 2017



BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
JAKARTA 2018

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT sehingga Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (Badan PPSDMP) dapat menyelesaikan Laporan Tahun 2017. Laporan ini mengungkap bentuk dokumentasi pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja Badan PPSDMP.

Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kinerja Badan PPSDMP dalam melaksanakan kegiatan dan anggaran 2017 dengan membandingkan target yang telah disusun dengan capaian dan realisasinya. Laporan ini sekaligus menjelaskan kendala dan permasalahan serta upaya-upaya penyelesaiannya.

Secara umum, target program 2017 dapat dicapai dengan baik, bahkan dalam kegiatan tertentu mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Namun demikian, kami menyadari bahwa masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya sehingga beberapa kegiatan belum sepenuhnya mencapai target. Hal ini menjadi catatan bagi Badan PPSDMP untuk dapat menyiapkan langkah-langkah antisipasi dan perbaikan kinerja dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan program dan anggaran tahun berikutnya.

Sistematika laporan terbagi dalam 5 (lima) bab, yaitu Bab I berisi Pendahuluan, Bab II menguraikan Organisasi dan Tata Kerja, Bab III menguraikan Program, Rencana, Realisasi Anggaran dan Kegiatan, Bab IV menguraikan Permasalahan dan Upaya Tindak Lanjut, serta Bab V berisi Penutup.

Kami menyadari bahwa Laporan Tahunan Badan PPSDMP Tahun 2017 ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, masukan dan sanggah saran dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) demi dalam rangka perbaikan pelaksanaan kegiatan ke depan sangat di harapkan.

Aktuarnya, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi bagi penyelesaian laporan ini. Kami berharap, laporan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja Badan PPSDMKP pada masa yang akan datang.

Jakarta, Februari 2018  
Kepala Badan,

  
Dr. H. Monica Rarasana MS  
NIP. 19610524 198603 1 000

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan .....	3
C. Cakupan .....	4
BAB II ORGANISASI .....	5
A. Dasar Hukum dan Organisasi .....	5
B. Kerangka Struktural dan Mekanisme Organisasi Badan PPSDMP. ....	13
BAB III RENCANA DAN REALISASI PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN .....	15
A. Program .....	16
B. Rencana Anggaran dan Kegiatan .....	18
C. Realisasi Anggaran dan Kegiatan .....	20
BAB IV PERMASALAHAN DAN UPAYA HINDAK LANJUT .....	24
A. Masalah .....	24
B. Upaya .....	25
C. Langkah .....	25
BAB V PENUTUP .....	42

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.	Komposisi Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Delana Tahun 2017 .....	6
Tabel 2.	Komposisi Alokasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan Utama .....	10
Tabel 3.	Komposisi Alokasi Anggaran Berdasarkan Kewenangan Sektor .....	15
Tabel 4.	Revisi Kegiatan dan Target Sektor PPSIDMP Tahun 2017 .....	17
Tabel 5.	Realisasi Anggaran Dalam PPSIDMP Tahun 2017 .....	19
Tabel 6.	Target dan Realisasi Kegiatan Pemantauan Sistem Persekolahan Pertanian Tahun 2017 .....	21
Tabel 7.	Target dan Realisasi Kegiatan Revitalisasi Sistem Persekolahan Pertanian Tahun 2017 .....	25
Tabel 8.	Target dan Realisasi Kegiatan Persekolahan Menengah Pedesaan Tahun 2017 .....	29
Tabel 9.	Target dan Realisasi Kegiatan Pemantauan Sistem Pelatapan Pertanian Tahun 2017 .....	32
Tabel 10.	Target dan Realisasi Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Layanan Badan PPSIDMP Tahun 2017 .....	34

## DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.	Komposisi Pegawai Badan PPSD&MP berdasarkan golongan (Data per 31 Desember 2017) .....	13
Gambar 2.	Komposisi Pegawai Badan PPSD&MP Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Data per 31 Desember 2017) .....	14
Gambar 3.	BPK sebagai POKD Pembanguaan Pertanian .....	21
Gambar 4.	Pengawasan Penyuluhan Pertanian di Sentra Pesisir .....	22
Gambar 5.	Kegiatan Praktek Mahasiswa SIFP .....	23
Gambar 6.	Kegiatan Praktek Siswa SMK-P2 .....	26
Gambar 7.	Pelaksanaan Ukht .....	30
Gambar 8.	Pelaksanaan Rapat Badan PPSI&F .....	35

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sembilan Agenda Prioritas (NAWA CITA) tahun 2015-2019 adalah: (1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara, (2) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, (4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, (5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, (6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, (7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, (8) Melakukan revolusi karakter bangsa, dan (9) Memperteguh kesehatan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Agenda prioritas di bidang pertanian berdasarkan rincian dari 9 Agenda Nawa Cita, yaitu (1) Peningkatan Agroindustri, dan (2) Peningkatan Kedaulatan Pangan.

Kedaulatan pangan dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri, yang didukung dengan: (1) ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dan produksi dalam negeri; (2) pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri; dan (3) mampu melindungi dan menyejahterakan petani utama pangan, terutama petani.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pada tahun 2015 - 2019 Kementerian Pertanian telah menetapkan visi Terwujudnya Sistem Pertanian Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis

Sumber daya lokal untuk Keadailatan Pangan dan Kesejahteraan Petani.

Dalam rangka mewujudkan visi maka misi Kementerian Pertanian adalah (1) Mewujudkan keadilan pangan, (2) Mewujudkan sistem pertanian berindustri berkelanjutan, (3) Mewujudkan kesejahteraan petani, (4) Mewujudkan Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka mewujudkan keadilan pangan diperlukan sumber daya manusia (SDM) pertanian yang berkualitas, andal, serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan, dan organisasi bisnis, sehingga pelaku utama dan pelaku usaha di sektor pertanian akan mampu membangun usahanya yang berdaya saing tinggi. Salah satu upaya untuk meningkatkan SDM Pertanian, terutama pelaku utama dan pelaku usaha adalah melalui kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian yang diindoklazifikasi dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, maka pelaksanaan penyuluhan dan pengembang SDM pertanian menjadi tugas fungsi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Badan PPSDMP).

Selaras dengan visi dan misi pembangunan pertanian yang ditetapkan Kementerian Pertanian dan sesuai dengan tugas fungsi, pada periode 2015-2019, Badan PPSDMP telah menetapkan visi organisasi, yaitu "Terwujudnya Sumber Daya Manusia Pertanian yang Profesional, Mandiri, dan Berdaya Saing Berorientasi Berindustri Berkelanjutan".

Upaya pencapaian visi Badan PPSDMP tersebut dilakukan melalui misi, yaitu:

1. Memperkuat Sistem Penyuluhan Pertanian yang Terpadu dan Berkelanjutan.
2. Memperkuat Sistem Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi

Profesi Pertanian yang Kredibel;

3. Memantapkan Sistem Pelatihan Pertanian yang Berbasis Kompetensi dan Daya Saing;
4. Memantapkan Sistem Administrasi dan Manajemen yang Transparan dan Akuntabel

Sejalan dengan visi dan misi DPPSDMP, tujuan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian tahun 2015 - 2019 adalah:

1. Meningkatkan kejujucirian kelembagaan petani;
2. Menghasilkan tenaga teknis menengah pertanian dan calon wirausaha muda yang kompeten dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kapasitas tenaga fungsional pertanian dan non aparaturn pertanian melalui pendidikan tinggi pertanian;
4. Meningkatkan kompetensi aparaturn pertanian dan non aparaturn pertanian yang berdaya saing dan bermartabat;
5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem administrasi dan manajemen

Arah kebijakan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian tahun 2015 - 2019 adalah:

1. Optimalisasi peran penyuluhan dalam pendampingan program swasembada pangan di tingkat BP3K dan WKPP;
2. Peningkatan daya saing dan kinerja hulu & hilir;
3. Revitalisasi SLPP dan SMKPP serta sertifikasi profesi pertanian;
4. Memantapkan sistem administrasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel.

Program yang dikelola dan menjadi tanggung jawab Badan PPSPDMP tahun 2017 adalah Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian. Kegiatan utama pada tahun 2017 yang mengacu pada Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Sistem Penyuluhan Pertanian;
2. Revitalisasi Pendidikan Pertanian serta Pengembangan Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian;

3. Pendidikan Menengah Pertama,
4. Peningkatan Sistem Pelatihan Pertanian
5. Dukungan Monev dan Dukungan Teknis Lainnya Raksas PPSDMMP

Untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, kegiatan penyusunan dan pelaksanaan SDM pertanian harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan baik di Pusat maupun di Daerah. Keterlaksanaan hasil penyenggaraan kegiatan tersebut wajib di pamer kepada para pemangku kepentingan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada instansi. Berkaitan dengan pertanggung jawaban kinerja tahun 2017, maka disusun Laporan Tahunan Badan PPSDMMP.

## B. Tujuan

Bersamaan Laporan Tahunan bertujuan untuk memberikan informasi penyelenggaraan Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani yang diselenggarakan melalui serangkaian kegiatan penyediaan dan pengembangan SDM pertanian selama tahun 2017.

## C. Output

Output laporan tahunan berupa dokumen yang berisi informasi mengenai penyelenggaraan program dan kegiatan Badan PPSDMMP selama tahun 2017 meliputi rencana dan realisasi program, kegiatan, anggaran, permasalahan dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan pada tahun berikutnya.

## BAB II ORGANISASI

### A. Dasar Hukum dan Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 43/Permentan/OT-11/PS/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, tugas Badan PPSDM adalah menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan SDY pertanian dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut. Badan PPSDM mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan tugas-tugas :

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
2. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
3. Pelaksanaan penyuluhan pertanian;
4. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan pertanian;
5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan pertanian;
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pertanian;
7. Pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Pelaksanaan tugas-tugas Badan PPSDM di pusat didukung oleh 4 unit kerja Eselon I, yaitu:

1. Pusat Penyuluhan Pertanian,
2. Pusat Pelatihan Pertanian,

3. Pusat Pendidikan Pertanian
4. Sekretariat Balai PPS-DEMP

Pusat Penyelidikan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis serta menyelenggarakan penyelenggaraan pertanian Pusat Penyelidikan Pertanian menyelenggarakan tugas:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penelitian pertanian,
2. Penyesuaian norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penelitian pertanian
3. Pembinaan lembaga teknis dan supervisi di bidang penyelidikan pertanian,
4. Pelaksanaan penyelenggaraan penelitian pertanian dan
5. Pelaksanaan pengorganisasian kelembagaan dan ketenagaan penyelidikan pertanian

Struktur organisasi Pusat Penyelidikan Pertanian terdiri atas 4 bidang/subbidang dan kelompok jabatan fungsional, yaitu:

1. Bidang Program dan Evaluasi Penelitian terdiri atas (a) Subbidang Program dan Kejasama Penyelidikan dan (b) Subbidang Evaluasi Penelitian,
2. Bidang Penyelenggaraan Penelitian terdiri atas (a) Subbidang Informatika dan Materi Penyelidikan dan (b) Subbidang Pambinaan Ketenagaan Pertanian
3. Bidang Ketenagaan dan Ketersediaan Penyelidikan terdiri atas (a) Subbidang Kelembagaan Penyelidikan dan (b) Subbidang Ketersediaan Penyelidikan dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional

Pusat Penelitian Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, serta penyelenggaraan pelatihan pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Pelaihar Pertanian menyelenggarakan tugas sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan kerjasama serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan pertanian;
2. Penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang pelatihan pertanian;
3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelatihan pertanian;
4. Pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan pertanian;
5. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagakan pelatihan pertanian;
6. Penyusunan dan pengembangan standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian.

Struktur organisasi Pusat Pelatihan Pertanian terdiri atas dua (2) bidang dan 6 subbidang, yaitu:

1. Bidang Program dan Kerjasama Pelatihan terdiri atas (4) Subbidang Program Pelatihan dan (1) Subbidang Kerjasama Pelatihan;
2. Bidang Penyelenggaraan, Ketenagakan dan Ketenasan Pelatihan terdiri atas (2) Subbidang Penyelenggaraan Pelatihan dan (1) Subbidang Ketenagakan dan Ketenasan Pelatihan;
3. Bidang Standarisasi dan Sertifikasi Profesi terdiri atas (1) Subbidang Standarisasi, Kompetensi dan (1) Subbidang Sertifikasi Profesi.

Pusat Penelitian Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis serta penyelenggaraan pendidikan pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Penelitian Pertanian menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan kerjasama serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan pertanian;
2. Pelaksanaan pengkajian sumber daya manusia pertanian;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

- pendidikan pertanian
- 4. Melakukan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan pertanian
- 5. Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan pertanian; dan
- 6. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan pendidikan pertanian

Pusat Pendidikan Pertanian terdiri atas 3 Bidang dan 6 subbidang, yaitu:

- 1. Bidang Program dan Kerjasama Pendidikan terdiri atas (a) Subbidang Program dan Evaluasi Pendidikan dan (b) Subbidang Kerjasama dan Tugas Helajar.
- 2. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan terdiri atas (a) Subbidang Kurikulum dan Sistem Pembelajaran dan (b) Subbidang Peserta Didik, dan
- 3. Bidang Ketenagaan dan Ketenagaan Pendidikan terdiri atas (a) Subbidang Kelembagaan Pendidikan dan (b) Subbidang Ketenagaan Pendidikan

Sekretariat Badan PPSDMP merupakan tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan PPSDMP. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Badan PPSDMP menyelenggarakan fungsi-fungsi:

- 1. Koordinasi, pengurusan rencana program dan anggaran, serta konsensus di bidang penyolulan dan pengembalian sumber daya manusia pertanian;
- 2. Pelaksanaan urusan sekretariat dan penyangkapan;
- 3. Penyusunan rangkai peraturan perundang-undangan, evaluasi dan pengempunan organisasi, tataaksana serta pelaksanaan urusan kepegawaian;
- 4. Evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; dan
- 5. Pelaksanaan urusan tata usaha Badan PPSDMP

Struktur organisasi Sekretariat Badan PPSDMP terdiri atas:

1. Bagian Perencanaan terdiri atas (a) Subbagian Program, (b) Subbagian Anggaran, dan (c) Subbagian Kejasama,
2. Bagian Keuangan dan Pertanggungjawaban terdiri atas (a) Subbagian Pembendaharaan, (b) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi, serta (c) Subbagian Perlengkapan,
3. Bagian Umum terdiri atas (a) Subbagian Hubungan dan Organisasi, (b) Subbagian Kepegawaian, dan (c) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga,
4. Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas (a) Subbagian Data dan Evaluasi, (b) Subbagian Pelaporan dan Tindak lanjut Hasil Pengawasan, dan (c) Subbagian Hubungan Masyarakat,
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selain jabatan \_ek\_ 4 unit organisasi Eselon II di Pusat, Badan PPSDMP juga memiliki 15 Unit Pelaksana Teknis (UPT) (20 Siswa Kerja Sederajat) yang berkedudukan di daerah. Badan PPSDMP terdiri dari 9 UPT Pendidikan Pertanian (6 UPT setingkat Eselon II, yaitu Sekolah Tinggi Penguluh Pertanian STPP, dan 3 UPT setingkat Eselon IV, yaitu Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri SMK-PPN). Selain itu, Badan PPSDMP memiliki 10 unit UPT Pelatihan Pertanian (3 UPT setingkat Eselon I terdiri dari 1 Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian PPMKP, 7 Balai Busur Pelatihan Pertanian Peternakan Kesehatan Hewan atau BBPP UBPKH, dan 2 UPT setingkat Eselon III, yaitu Balai Pelatihan Pertanian BPP).

Selain lengkap, insang-insang UPT DPPSDMP ada 20 sebagai berikut:

UPT Pendidikan Pertanian terdiri dari:

1. STPP Madiun, Sukorejo, Jombang, Sukren;
2. STPP Bogor, Lembang, Garut (Suker);
3. STPP Magelang, Lembang, Sukren;
4. STPP Malang, Lembang, Sukren;

- 5 STPP Gowa Sulawesi Selatan (1 Satker);
- 6 STPP Merauke Papua Barat (1 Satker);
- 7 SMK-PPN Sembawa Palembang Sumatera Selatan (1 Satker);
- 8 SMK-PPN Banjarbaru Kalimantan Selatan (1 Satker);
- 9 SMK-PPN Kupang Nusa Tenggara Timur (1 Satker).

**UPT Pelatihan Pertanian terdiri dari:**

- 1 Pusat Penelitian Manajemen dan Kepemimpinan Petani (PPMKIP) Ciawi-Bogor Jawa Barat (1 Satker);
- 2 Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cigugur-Bogor Jawa Barat (1 Satker);
- 3 Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang Jawa Barat (1 Satker);
- 4 Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan-Malang Jawa Timur (1 Satker);
- 5 Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu Jawa Timur (1 Satker);
- 6 Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang Nusa Tenggara Timur (1 Satker);
- 7 Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binanga Kalimantan Selatan (1 Satker);
- 8 Balai Besar Pelatihan Petani (BBPP) Batanghari Sulawesi Selatan (1 Satker);
- 9 Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi (1 Satker);
- 10 Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung (1 Satker).

Balai-balai eksistensi kelembagaan UPT meliputi Badan PPSUMF masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Presiden Nomor 20 tahun 2001 tentang Peraturan Sekolah Tinggi Pendidikan Pertanian Bogor dan Sekolah Tinggi Pendidikan Pertanian Malang yang diunduk dengan Undang-Undang Keputusan Menteri Pertanian Nomor. 550/Kas. OT/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor. 167/Kas. OT/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja

- Sekolah Tinggi Penyeluluh Pertanian Malang dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 554/Kpts/OT.210/9/2002, tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 368/Kpts/OT.210/6/2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyeluluh Pertanian Bogor;
2. Keputusan Presiden Nomor: 58/2002 tentang Pembinaan STPP Medan, STPP Magelang, STPP Gowa dan STPP Marokwari, yang ditindaklanjuti dengan
    - a. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 549/Kpts/OT.210/9/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja STPP Medan;
    - a. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 551/Kpts/OT.210/9/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja STPP Marokwari;
    - a. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 552/Kpts/OT.210/9/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja STPP Gowa;
    - a. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 553/Kpts/OT.210/9/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja STPP Magelang
  3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 100/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian.
  4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 101/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang.
  5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 102/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupong
  6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 103/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketardat.
  7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 104/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketardat.
  8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 105/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu.

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 106/Permentan/OT/140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Kalimantan
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 107/Permentan/OT/140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Ke-Chitan Hewan Cendana
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 108/Permentan/OT/140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan Pertanian Jambi
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 109/Permentan/OT/140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan Pertanian Lampung
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 110/Permentan/OT/140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri

Selain di pusat dan UPT, kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian dilaksanakan oleh Satuan Kerja (Satker) induk Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota dengan sumber anggaran dan DIPA Badan PPSDMP. Satuan Kerja tersebut adalah Satker Dekonsentrasi di tingkat provinsi dan Satker Tugas Pembantuan di tingkat kabupaten/kota, seperti Dinas Pertanian Provinsi atau Kabupaten/kota, Badan Ketahanan Pangan dan Pengolahan (BKPP) Provinsi atau Kabupaten/kota, dan Balai Pelatihan Pertanian, BPP Kabupaten/kota.

## B. Ketersediaan Sumber daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan PPSDMP didukung oleh 2.118 orang aparat yang terdiri 223 aparat yang bertugas di pusat termasuk 302 orang dan di daerah (UPT Pusat) sebanyak 1.817 orang.

Komposisi pegawai Badan PPSDMP berdasarkan

### 1. Golongan:

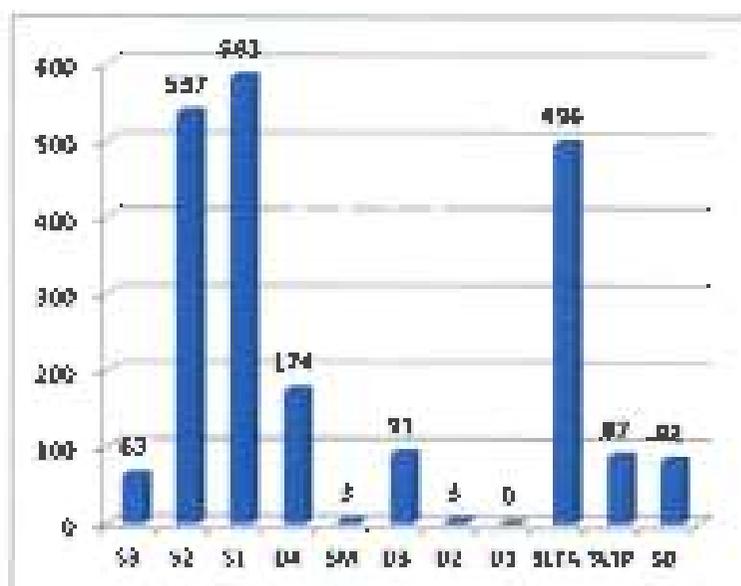
Pegawai Badan PPSDMP berdasarkan golongan terdiri atas golongan I sebanyak 70 orang, golongan II sebanyak 470 orang, golongan III sebanyak 1.261 orang, dan golongan IV sebanyak 318 orang. Komposisi pegawai berdasarkan golongan ditampikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Komposisi Pegawai Badan PPSDMP berdasarkan golongan

## 2. Tingkat pendidikan

Pegawai Badan PPSDMP berdasarkan tingkat pendidikan terdiri atas 58 orang berpendidikan S3 (doktor), 507 orang berpendidikan S2 (magister), 809 orang berpendidikan S1/D1 (sarjana/strata sarjana), 107 orang berpendidikan D1/D3 (diploma), 558 orang berpendidikan SLTA, 92 orang berpendidikan SLTP, dan 161 orang berpendidikan SD. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan ditampikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Komposisi Pegawai Badan PPSERP Berdasarkan Tingkat Pendidikan

## BAB III RENCANA DAN REALISASI PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN

### A. Program

Program yang dikelola dan menjadi tanggung jawab Badan PPSDMP tahun 2017 adalah Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian dengan fokus pada peningkatan efektivitas penyuluhan dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional. Oleh karena itu, Badan PPSDMP memiliki fungsi ekonomi sekaligus fungsi pendidikan. Dengan fungsi ganda tersebut, tahun 2017 Badan PPSDMP mengembang 2 program, yaitu (1) Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian; dan (2) Program Pendidikan Menengah Pertanian.

### B. Rencana Anggaran dan Kegiatan

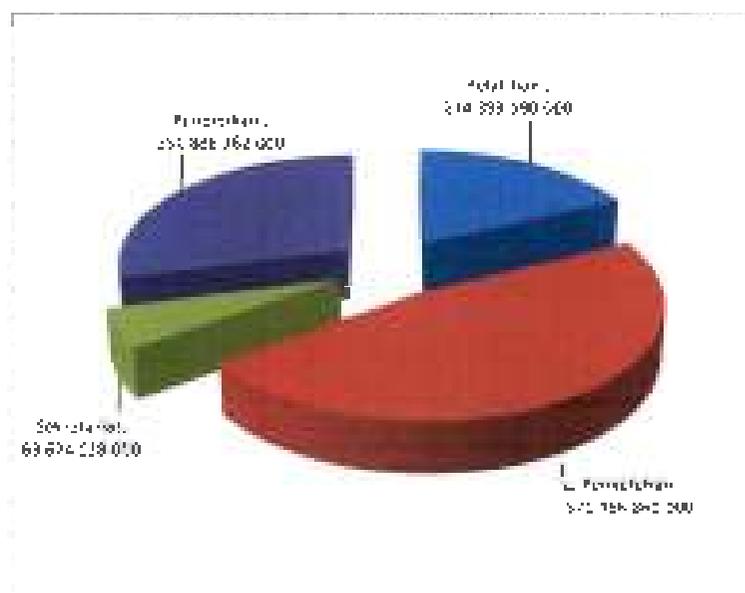
#### 1. Alokasi Anggaran

Anggaran tahun 2017 dialokasikan dalam rangka mendukung kinerja 4 unit kerja Eselon II, yaitu Pusat Penyuluhan Pertanian, Pusat Pelatihan Pertanian, Pusat Pendidikan Pertanian, serta Sekretariat Badan PPSDMP. Selain itu anggaran ditujukan untuk 20 Satker Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat, 34 Satuan Kerja (Satker) Dekonsentrasi Pemerintah Daerah di Tingkat Provinsi (Dinas/Badan), serta 8 Satker Tugas Pembantuan Pemerintah Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota (Dinas/Badan).

Pada Anggaran Badan PPSDMP Tahun 2017 sebesar Rp 1.207.410.450.000,-. Adapun komposisi anggaran berdasarkan kegiatan utama ditampilkan pada Tabel 1; jenis belanja pada Tabel 2; dan kewenangan satker pada Tabel 3.

**Tabel 1.**  
**Komposisi Alokasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan Utama Tahun 2017**

NO	KEGIATAN	PACRI (Rp)
1	Pemertapan Sistem Pelatihan Pertanian	214.393.190.000
2	Pemertapan Sistem Penyuluhan Pertanian	571.438.860.000
3	Dukung dan Monev dan Dukung Fokus Utama Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	69.674.238.000
4	Pendidikan Pertanian	751.888.362.000
TOTAL		1.207.000.450.000

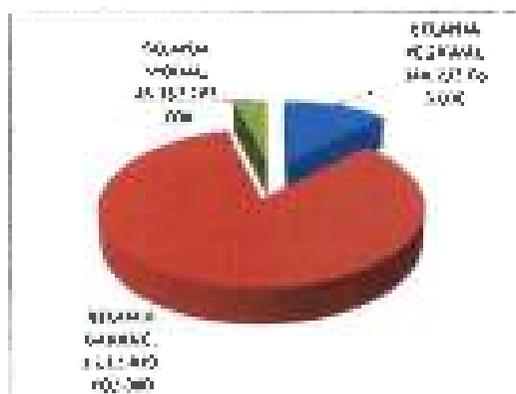


**Gambar 3.** Komposisi Alokasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan Utama Tahun 2017

Alokasi anggaran berdasarkan Belanja Inklusif Badan PPSIDMP terdiri dari (1) Belanja Pegawai, (2) Belanja Barang, dan (3) Belanja Modal. Dalam Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Badan PPSIDMP tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 2 dan Gambar 2.

**Tabel 3.**  
**Komposisi Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja**  
**Tahun 2017**

No	JENIS BELANJA	PAJAU (Rp)
1	BELANJA PEGAWAI	158.281.065.000
2	BELANJA BARANG	1.012.355.947.000
3	BELANJA MODAL	48.764.768.000
<b>TOTAL</b>		<b>1.207.391.780.000</b>

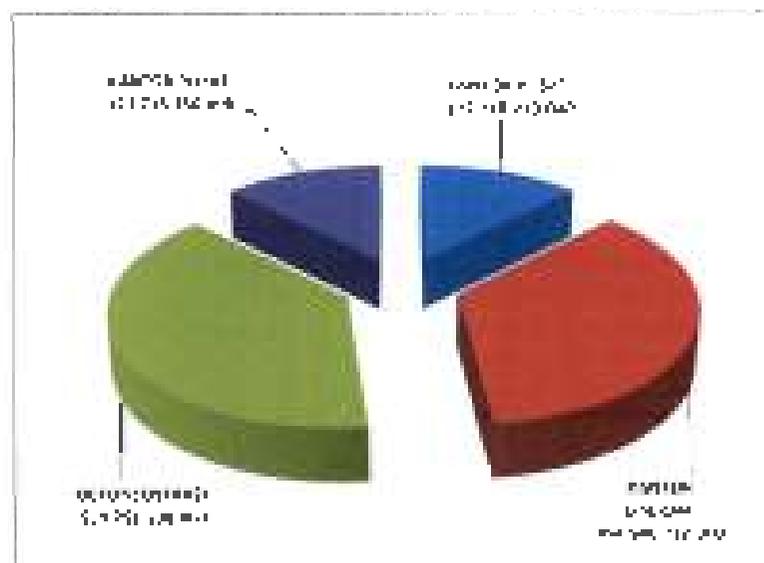


**Gambar 4.** Komposisi Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2017

Alokasi anggaran ini didasarkan Wewenang Menteri Keuangan, Kantor PPSDM (Lampiran 1a), Kantor Pajak (Lampiran 1b), Kantor Direktorat Jenderal Pajak (Lampiran 1c), Kantor Pajak (Lampiran 1d), Kantor Pelayanan Pajak (Lampiran 1e), dan Kantor PPSDM Tahun 2017 dan dapat dilihat pada Tabel 3 dan Gambar 4.

Tabel 3.  
Alokasi Anggaran Berdasarkan kewenangan Sarker Tahun 2017

No	KEGISTARIAN	RAGU (Rp)
1	KANTOR PUSAT	172.718.230.000
2	KANTOR DASARAJI	304.945.702.000
3	DEKONSENTRASI	819.751.584.000
4	KANTOR PUSAT	172.718.230.000
TOTAL		829.993.456.000



Gambar 5. Alokasi Anggaran Berdasarkan kewenangan Sarker Tahun 2017

## 2. Rencana Kegiatan

Kegiatan yang akan dilakukan oleh Badan PPS, DKL untuk memantapkan Sistem Manajemen Perantara (SMP) Berbasis Sistem Elektronik Pertama serta Pengembangan Berbasis SMP dan Sertifikasi Profesi Perantara (SP) Sertifikasi Menengah Pertama (SM) Memantapkan Sistem Pelatihan Pegawai (SLP) Dukungan Manpower dan Dukungan Teknis Lainnya Dalam

PPSDMP mempunyai target sasaran pada tahun 2017. Rencana kegiatan dan target sasaran kegiatan Badan PPSDMP pada tahun 2017 secara rinci disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4,  
Rencana Kegiatan dan Target Sasaran Badan PPSDMP  
Tahun 2017

No	RENCANA KEGIATAN	TARGET	SASARAN
<b>A. PENYULUHAN</b>			
<b>1. FASILITASI KEMERDEGAAN PETANI</b>			
a	Sekolah dasar tentang konsep LTAUS	819 unit	Sekolah dasar
b	Pengembangan kearifan lokal (Kultur Ekonomi Petani (KEP))	400 unit	Gapokan, LKMA, KLR
c	Pengawasan dan Pendampingan APGSP	7.200 unit	APGSP
<b>2. FASILITAS KETENAGAAN</b>			
a	RUP Perajalah Ferhanti PNS	24.677 orang	Perajalah PNS
b	Honor dan BOP THL-TBPP	18.778 orang	THL-TBPP
c	Pena	3.000 orang	Pena
<b>3. FASILITAS PEMANTAPAN SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN</b>			
a	Penyusunan dan Perbanyak Informasi dan Materi Penyuluhan Pertanian	558 judul	Penyuluhan Informasi dan Materi yang sudah beredar Beragam Website, YouTube, Facebook, Media Elektronik (Handphone), Media Cetak (jurnal, brosur, artikel dan tabloid dan bahan lainnya)
<b>B. PENDIDIKAN</b>			
1	Keterbacaan Pendidikan Pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan	9 unit	STPP dan SMK-PP
2	Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pertanian	1800 orang	Manajemen STPP
3	Fasilitas Pendidikan Formal S2 dan S1 Bagi Aparatur Pertanian Tinggi Pertanian	700 orang	PNS Kelompok Pertanian yang telah mengikuti persyaratan-persyaratan tugas belajar
4	Kemampuan Pendidik	290	Dosen STPP



NO	RINCIAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI
	Salah satu fungsi pelayanan dan pelaksanaan serta evaluasi, koordinasi, dan pembinaan		Kelembagaan PPSDMP

## C. Realisasi Anggaran dan Kegiatan

### 1. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Badan PPSDMP tahun 2017 yaitu sebesar 92,37%, dengan rincian realisasi per kegiatan masing-masing terdapat pada Tabel 5.

Tabel 5.  
Realisasi Anggaran Badan PPSDMP Tahun 2017

NO	KEGIATAN	PLUJ	REALISASI	%
1	Perencanaan Sistem Bilangan Benar	14.200.000.000	10.295.900.000	72,49
2	Perencanaan Sistem Pendidikan Pertanian	11.450.000.000	10.115.500.000	88,42
3	Dukung pelaksanaan kegiatan teknis, termasuk kegiatan dan pengembangan SDM Pertanian	49.070.000.000	38.557.271.525	78,58
4	Penyediaan Perantara	14.290.000.000	12.711.150.000	89,01
	<b>Total</b>	<b>87.010.000.000</b>	<b>71.679.821.525</b>	<b>82,37</b>

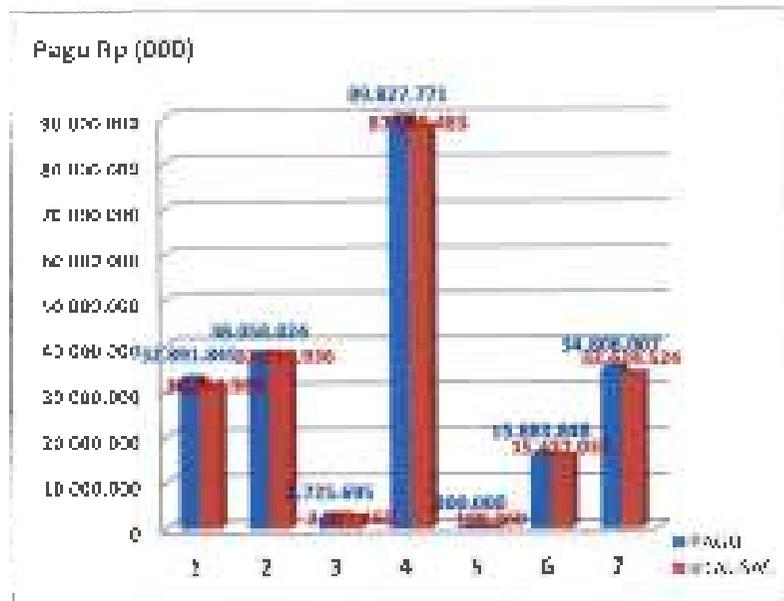
### 11 Pusat Pelatihan Pertanian

Realisasi anggaran pada Pusat Pelatihan Pertanian tahun 2017 mencapai Rp208.313.329.376,- (97,16%) dari pagu sebesar Rp 214.597.190.000,-. Realisasi tertinggi terdapat pada Peningkatan kapasitas kader/dinas pelatihan di wilayah sebesar 100,00%, sedangkan realisasi terendah terdapat pada Tim ukur panen dan pengolahan pertanian yang disertifikasi sebesar 84,66%. Sesuai dengan realisasi Anggaran Pusat

Delapan Perhatian pada tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 6 berikut:

Tabel 6 Realisasi Anggaran Fisik Pelatikan Perencanaan Tahun 2017

NO	URAIAN	PAGOP	REALISASI	%
1	Bantuan Operasional Penyelenggaraan	1.391.845.400	1.041.511.507	74,84
2	Bantuan Operasional Penyelenggaraan	38.048.026.000	3.702.000.000	9,73
3	Gratifikasi dan honorarium pelaksanaan	2.125.000.000	2.107.450.000	99,16
4	Amal IHT pelaksanaan kegiatan pelatihan dan seminar	41.821.221.000	37.001.491.111	88,48
5	Perjalanan dinas/kegiatan	20.000.000	18.180.000	90,90
6	Insentif dan gratifikasi	5.000.000.000	4.117.211.700	82,34
7	Insentif dan gratifikasi	20.000.000.000	18.284.424.420	91,42
	<b>Jumlah</b>	<b>114.394.100.000</b>	<b>106.215.329.276</b>	<b>92,86</b>



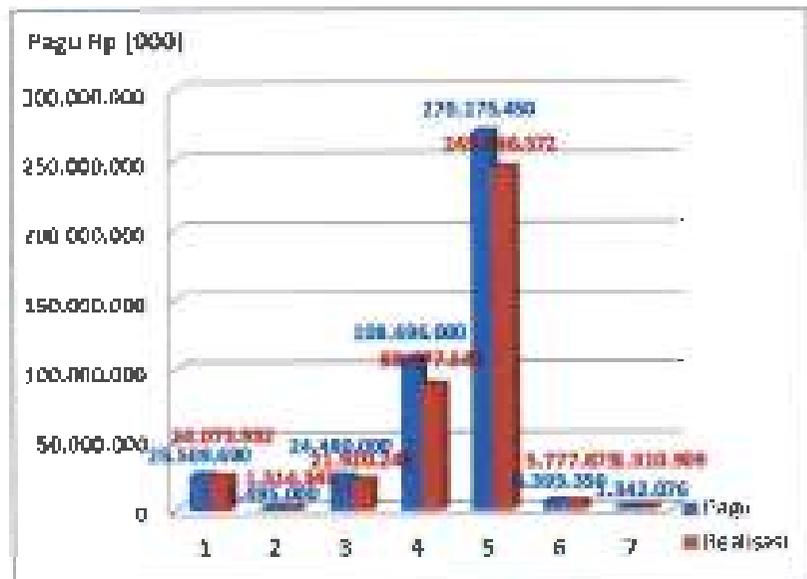
Gambar 6. Realisasi Anggaran Pusat Pelatihan Pertanian Tahun 2017

## 2) Pusat Penyuluhan Pertanian

Realisasi anggaran pada Pusat Penyuluhan Pertanian tahun 2017 mencapai Rp. 516.159.551.920,- (80,32%) dari pagu sebesar Rp. 641.456.860.000,-. Realisasi tertinggi terdapat pada Penyusunan dan Penyediaan Informasi dan Materi Penyuluhan Pertanian sebesar 97,68%, sedangkan realisasi terendah terdapat pada UPT Penyuluhan Pertanian PNS sebesar 80,37%. Secara umum realisasi Anggaran Pusat Pelatihan Pertanian pada tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 7 berikut:

Tabel 7  
Realisasi Anggaran Fungsi Penyelenggaraan  
Pertanian Tahun 2017

No	RENCANA KEGIATAN	PAJOK	REALISASI	%
1.	<b>FASILITAS KELEMBAGAAAN PELAYAN</b>			
a.	Sekolah Lapangan Masyarakat (SLM)	25.000.000.000	24.775.012.500	99,10
b.	Program bantuan kelembagaan Peternak (KLP)	1.500.000.000	1.344.345.000	89,62
c.	Program bantuan untuk Pemberdayaan AP/IBSP	24.480.000.000	23.536.212.000	96,14
2.	<b>FASILITAS KETERANGAN PENYULUHAN</b>			
a.	SLP Peternak Persebaran 0145	105.000.000.000	80.477.511.500	76,64
b.	Herod dan SP/IBSP/SLP	75.175.000.000	20.906.575.000	27,81
c.	Penyul	5.000.000.000	3.778.000.000	75,56
3.	<b>FASILITAS PEMANTAPAN SISTEM PENYULUHAN PERFORMAN</b>			
a.	Trainer dan dan Pendamping Peternak dan Masyarakat Peternak Persebaran	1.100.000.000	1.010.014.000	91,82



Gambar 7. Realisasi Anggaran Pusat Penyeluban Perluasan Takus 2017

### 3) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Anggaran Sekretariat Badan PPSMMP pada tahun anggaran 2017 adalah Rp 69,674,038.000. Anggaran pada Sekretariat Badan terbagi pada beberapa bagian, yaitu Bagian Perencanaan, Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Evaluasi, Layanan Interna (*Overhead*), dan Layanan Perkantoran. Pembagian anggaran sekretariat Badan secara rinci dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8  
Pagu Anggaran Sekretariat Badan PPSMMP Tahun 2017

NO.	KETERANGAN	PAGU
1	Bagian Perencanaan	22.376.992.000
2	Bagian Umum	5.899.874.000
3	Bagian Keuangan Dan Perlengkapan	7.251.109.000
4	Bagian Evaluasi dan Pelaporan	5.810.675.000

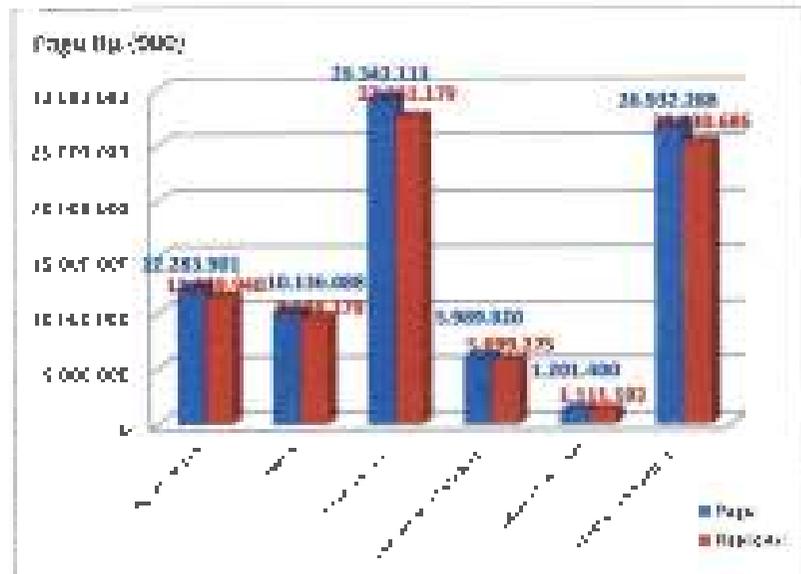
NO.	KETERANGAN	PAGU
5	Layanan Internal (Overhead)	1.201.400,000
6	Layanan Perkantoran	26.932.288,000
	<b>TOTAL</b>	<b>69.674.038,000</b>

Realisasi Anggaran Sekretariat Badan PPSDMP tahun 2017 mencapai Rp. 58,254,580,287,- (83,61%) dari pagu sebesar Rp. 69,674,038,000,-. Realisasi tertinggi tercapai pada Bagian Evaluasi dan Pelaporan sebesar 95,15%, sedangkan realisasi terendah tercapai pada Bagian Perencanaan sebesar 92,32%. Secara ringkas realisasi Anggaran Sekretariat Badan PPSDMP pada tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 9 berikut:

**Tabel 9**  
**Realisasi Sekretariat Badan PPSDMP Tahun 2017**

NO.	KETERANGAN	PAGU	REALISASI	%
1	Bagian Perencanaan	12.281.901,000	11.309.640,829	92,32
2	Bagian Umum	10.116.988,000	9.598.179,558	94,10
3	Bagian Keuangan dan Perencanaan	29.342.113,000	27.561.179,051	93,92
4	Bagian Evaluasi dan Pelaporan	5.689.820,000	5.609.275,281	95,15
5	Layanan Internal (Overhead)	1.201.400,000	1.111.592,818	92,52
6	Layanan Perkantoran	26.932.288,000	25.230.686,363	93,68
	<b>TOTAL</b>	<b>69.674.038,000</b>	<b>58.254.580,287</b>	<b>83,61</b>





Gambar 8. Realisasi Anggaran Sekretaris/ Badan PPSDMP tahun 2017

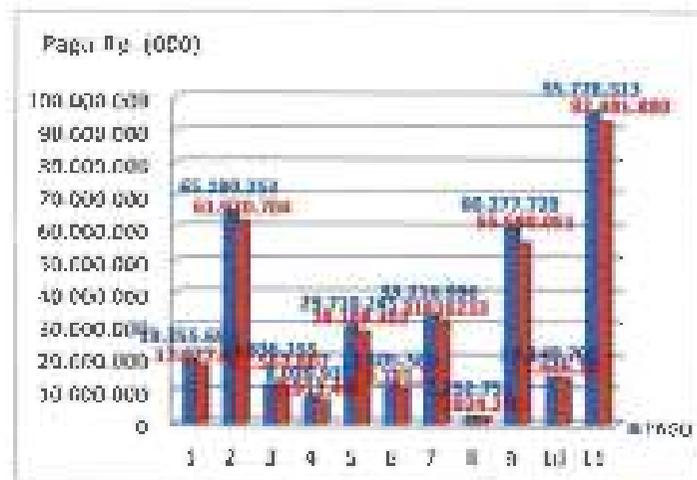
#### 4) Pendidikan Pertanian

Realisasi pelaksanaan anggaran Pusat Pendidikan Pertanian pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp.332.353.981,175 (94,46%) dari pagu Rp.351.886.362.000, dengan rincian realisasi per segmen seperti berikut dalam bilangan bulat pada Tabel 10.

Tabel 10.  
Realisasi Anggaran Pusat Pendidikan Pertanian tahun 2017

No	BENEFISIAR/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Sekelompok Pendidikan Pertanian dan Industri dan Disembelkan	24.655.485,000	23.627.874,380	95,87
2	Kegiatan Pendidikan Tinggi Pertanian	47.780.243,000	46.959.704,111	98,49
3	Pendidikan Pendidikan Formal S2 dan S1 (Dipg) Koperasi Pertanian Melalui Pagar Diklat	11.836.175,000	11.363.007,455	95,99
4	Kegiatan Pendidikan Tinggi Pertanian	6.026.959,000	6.012.938,750	99,76

5	Pendampingan Mahasiswa NIPP dan Perguruan Tinggi Mitra dalam melaksanakan program	29.710.242.000	28.108.162.915	94,61
6	Pencapaian Wawasanmuda Maska Pertanian	12.105.586.000	10.791.172.648	89,96
7	Pencabangan Produk/layanan Mengubah Pertanian	5.017.996.000	51.816.233.975	95,78
8	Kemampuan Pendidikan Menengah Pertanian	7.000.759.000	7.004.779.229	99,96
9	Pendampingan Mahasiswa NIPP dan Perguruan Tinggi Mitra Mengikuti Sertifikasi Program (SIP/SP)	60.217.229.000	58.560.531.074	97,26
10	Kemampuan Pendidikan Pertanian yang difasilitasi dan dibantu melalui (SIP/SP) Skala	5.149.706.000	5.646.283.714	99,48
11	Layanan Persastaraan	95.778.514.000	92.881.880.127	96,95
TOTAL		351.886.262.000	332.043.482.175	94,46



Gambar 96. Realisasi Anggaran Pusat Pendidikan Pertanian Tahun 2017

### 3. Realisasi Kegiatan

Realisasi kegiatan merupakan capaian fisik dan masing-masing kegiatan kelompok kegiatan output utama Badan PPS DMP selama tahun 2017 dengan cara membandingkan antara realisasi anggaran rencana dan biaya

a. **Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian**

Upaya pemantapan sistem penyuluhan pertanian didukung oleh kegiatan-kegiatan yang antara lain:

1) **Fasilitasi kelembagaan penyuluhan pertanian**

Pelaksanaan fasilitasi kelembagaan penyuluhan pertanian: (penumbuhan dan pengembangan KEP sekolah lapang mendukung UPSUS di tingkat Kecamatan dan penyelenggaraan PI NAS).



Gambar 10. Perobukaan Pekan Nasional (Penas) Petani-Nelayan XV di Stadion Harapan Bangsa, Lhoong Raya, Banda Aceh

- 2) **Fasilitasi dan pengembangan kelembagaan petani**  
 Capaian fasilitasi dan pengembangan kelembagaan petani didukung oleh kegiatan: (a) Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani serta (b) Pemberdayaan Petani di Sentra Produk Pangan.



Gambar 11. Pertemuan Penumbuhan dan pengembangan kelompok tani dilakukan melalui pemberdayaan petani untuk mengubah pola pikir dan memotivasi pelaku utama dan pelaku usaha di bidang pertanian.

### 3) **Fasilitasi ketenagaan penyuluh pertanian**

Fasilitasi bagi penyuluh pertanian didukung dengan kegiatan: (a) Biaya Operasional Penyuluh Pertanian PNS; (b) Honorarium dan Biaya Operasional THT-14 Penyuluh Pertanian selama 11 bulan; dan (c) Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya.



Gambar 12. Pertemuan Dibantu 10 Tokoh Publik Penyeluh dan Pelais Pengawan dan Pesampingan Regulas APBS-P



- 4) **Penyusunan dan perbanyak materi penyuluhan**  
 Fasilitas bagi materi penyuluh dalam bentuk kegiatan:  
 (a) Penggunaan Label Pertanian bagi Penyuluh Pertanian (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan) (b) Penggunaan Majalah Pertanian bagi ke lembaga penyuluhan provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. (c) Penyusunan dan Penyebarluasan Materi Penyuluhan tingkat provinsi dan kabupaten/kota, (d) Penyusunan dan Penyebaran Media Informasi Spesifik Lokasi



Gambar 13. Materi Penyuluhan Pertanian

Perbandingan realisasi kegiatan dengan target sistem kegiatan antara lain: mantapan Sistem Edukasi dan Perikanan Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11.  
Target dan Realisasi Kegiatan Pemantapan Sistem  
Penyulhan Pertanian Tahun 2017

KO	KEMASAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1.	<b>FASILITASI KEMERDEKAAN PEKANI</b>			
a.	Sosialisasi yang mendukung LINDU	90 orang	816 orang	150%
b.	Mengembangkan Keterampilan dan Penjualan (D)	150 orang	180 orang	90%
c.	Pengembangan dan Pemeliharaan APISAP	2.250 orang	6.570 orang	300%
2.	<b>KEMAMPUAN KELOMPOK PEMULUTAN</b>			
a.	200 Petani dan Tenaga PNS	20.75 orang	20.750 orang	62,8%
b.	Daerah dan POKYAH/THIP	18.75 orang	11.900 orang	60%
3.	<b>KEMAMPUAN PEMERIKSAAN SISTEM PENYULHAN TERKINERJA</b>			
a.	Penyuluhan dan Pemantauan Lapangan dan Monev Penyuluhan Gempak	388 orang	500 orang	100%

#### b. Revitalisasi Sistem Pendidikan Perikanan

Upaya kegiatan Revitalisasi Pendidikan Perikanan melalui pengembangan kegiatan

Di Kelembagaan Pendidikan Perikanan yang difasilitasi dan dikembangkan

Kegiatan yang dibenarkan untuk meredakan kegiatan Kelembagaan Pendidikan Perikanan yang eksistensinya dapat berkembang melalui kegiatan: (a) Olah Raga dan Komunikasi





Belajar, (e) Pendaftaran Peserta Tugas Belajar, (f) Bantuan Beasiswa Program Tugas Belajar S2, (g) Bantuan Beasiswa Program Tugas Belajar S3, (h) Koordinasi dan Evaluasi Tugas Belajar dengan 10 Perguruan Tinggi, (g) Pembekalan, Pengawasan dan Pendampingan Tugas Belajar Dalam Negeri



Gambar 16. Koordinasi dan Evaluasi Tugas Belajar Program S1 dan S3 Lingkup Kementerian Pertanian Bersama Perguruan Tinggi Mitra

#### (4) Keterngnaan Pendidikan Tinggi Pertanian

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan Kementerian Pendidikan Tinggi Pertanian, meliputi (a) Tugas Temasi Kementerian Pendidikan Tinggi Pertanian, (b) Pengelolaan Pangkalan Data DKKI, (c) Perencanaan Mut. Pendidikan, (d) Penghargaan Tenaga Pendidikan Berprestasi Tahun 2017, (e) Penguatan Calbe.

Desain, Desain Makna, Persepsi (4) Penilaian dan Persepsi Angka Kadat: Dosis dan PEP, Urutan: Makna, Persepsi, Kemampuan, Kurva, Bentuk, Urutan, Persepsi.

**(5) Pendampingan Mahasiswa STPP dan Perguruan Tinggi Mitra Mencapai Sasaran pada Penguatan.**

Untuk mendukung kegiatan Pendampingan Mahasiswa STPP dan Perguruan Tinggi Mitra Mencapai Sasaran pada Penguatan dilakukan kegiatan sebagai berikut: (a) Ketersediaan Kebutuhan Pendampingan Mahasiswa dan Perguruan Tinggi, (b) Pendampingan saat Persidhan (APBS PISA) Kapas, Koneksi, (c) Koneksi, (d) Master, (e) Pendampingan dan Pengawasan, (f) Workshop Hasil Pengawasan, (g) Pelaksanaan Laporan, (h) Koneksi, (i) Dan lain.



**Gambar 17. Gelar Brevet Pendampingan**

**(6) Petumbuhan Wirasahawan Muda Pertanian**

Untuk mendukung kegiatan Tahunan Wirasahawan Muda Pertanian dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: (1) Regenerasi dan Sumbido Perembong Wirasaha Muda Pertanian oleh Mahasiswa SKPP, Siswa SKKPP dan Alumni Perguruan Tinggi Mula; (2) Workshop Tahunan Wirasahawan Muda Pertanian; (3) Perkemahan Tahun Wirasahawan Muda Pertanian; (4) Perkemahan Tahun Wirasahawan Muda Pertanian; (5) Pekan Inovasi Pembuluh Wirasahawan Muda Pertanian; (6) Perseminan Sumbido; (7) - (8) Tabung Penyediaan (P-SKPP); (9) Perseminan Seleksi Mula; (10) Tabung Penyediaan (P-SKPP); (11) Koneksi Sumbido; (12) Upacara Seleksi Mula; (13) Tabung Penyediaan (P-SKPP); (14) Anggota Peserta di Bulan Usaha Sukses; (15) Tabung Penyediaan (P-SKPP); (16) Pembinaan Peserta di Bulan Usaha Sukses; (17) Tabung Penyediaan (P-SKPP); (18) Pembinaan dan Pengkajian; (19) Tabung Penyediaan (P-SKPP); (20) Koneksi Sumbido; (21) Tabung Penyediaan (P-SKPP); (22) Start Up Usaha; (23) Tabung Penyediaan (P-SKPP); (24) Lulus Kegiatan; (25) Tahun Mula (P-SKPP)



Gambar 18. Program Penumbuhan Wirausaha Muda Pertanian ( 21 Desember 2017)

#### (7) Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Pertanian

Untuk mendukung kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian melalui Pendidikan Menengah Pertanian dilakukan kegiatan sebagai berikut: (a) Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan, Pengawasan Ujian dan Wisuda di SMK-PP; (b) Pembinaan Generasi Muda Melalui Saka Taruna; (c) Perlakuan Guru Kejuruan Negeri; (d) Peningkatan Kompetensi Generasi Muda Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura; (e) Peningkatan Kompetensi Generasi Muda Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; (f) Karya Inovatif Siswa SMK-PP; (g) Workshop Pembinaan Peserta Didik; (h) Koordinasi Teknis Pendidikan Pertanian; (i) Bantuan Praktek Siswa SMK-PP



Gambar 19. SMK-PP N Lingsap Badan PPSBAP

**4) Keternagan Pendidikan Menengah Pertanian**

Untuk mendukung kegiatan Keternagan Pendidikan Menengah Pertanian di kawasan kegiatan sebagai berikut:  
 1) Bencanpung, 2) dan Pengawasan Transformasi Pendidikan Menengah, 3) Pendidikan Pengembangan dan Karyo Lingsap Guru, 4) Pengawasan Manajemen Kepala Sekolah, 5) dan 6) Pendidikan dan Pengembangan Karyo Lingsap dan PIP Lingsap, 7) dan 8) Pendidikan dan Pengembangan Lingsap dan 9)



Gambar 20. Lahan Praktek SISWA SMK-PP N

Perbandingan realisasi kegiatan dengan target sasaran Revitalisasi Pendidikan Pertanian secara ringkas & ditampilkan pada Tabel 12

Tabel 12.  
Target dan Realisasi Kegiatan Revitalisasi Pendidikan  
Pertanian Tahun 2017

NO	RENCANA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Kelompokan Pendidikan Pertanian yang ditasirlana dan dikembangkan	9 unit	9 unit	100
2.	Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pertanian	3500 orang	3500 orang	100
3.	Facilitasi Pendidikan Formal S2 dan S3 Bagi Aparatur Pertanian Tinggi Pertanian	100 orang	100 orang	100
4.	Ketersediaan Pendidikan Tinggi Pertanian	280 orang	280 orang	100
5.	Pencapaian Mahasiswa STPP dan Perguruan Tinggi Mitra mencapai sebanyak 28000	2.600 orang	2658 orang	101,26
6.	Pembinaan Wirausahawan Muda Pertanian	717 kelompok	717 kelompok	100
7.	Pemertigaraan Pendidikan Menengah Pertanian	221,07	24543	111
8.	Ketersediaan Pendidikan Menengah Pertanian	110	110	100

e. **Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian**

Capaian kegiatan utama: Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian melalui pelaksanaan kegiatan yaitu:

1) Peningkatan Kompetensi SDM Pelatihan Pertanian (orang), terdiri dari pelatih, tenaga operator dan tenaga asisten

a) Pelatihan bagi aparat desa/ramanre 2016 sebagai:

(1) Pelatihan dan Asesmen (Pelatihan Keperencanaan, Pelatihan Lapangan, Pelatihan Administrasi dan Manajemen), Pelatihan Fungsional Kurang Daya Hayat Pertanian

(2) Pelatihan Teknis Pertanian (melakukan konsultasi pertanian, Teknik Tanaman Pangan, Teknik Perkebunan, Teknik Hortikultura, Teknik Perikanan, Kula, Lumbung dan Daya Samsa Pertanian)

b) Pelatihan bagi aparat desa/ramanre meliputi pelatihan:

(1) Pelatihan Keselamatan

(2) Pelatihan Teknis Perikanan, Suku, dan Keselamatan pangan

(3) Pelatihan Managemen dan Administrasi (Agri Business Camp)



Gambar 21. Pelatihan Teknis Tematik Non-Operator



Gambar 22. Diklat Teknis Agribisnis Kelapa Sawit

## 2) Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian

Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian merupakan proses pemberian sertifikat yang ditujukan secara sistematis dan objektif terhadap kompetensi seseorang dengan

selancar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) standar Internasional dan standar Sertifikasi kompetensi di maksudkan untuk memberikan pengakuan dan penghargaan kompetensi, serta jaminan dari pemeliharaan kompetensi, untuk mewujudkan sistem sertifikasi kompetensi yang berkualitas



**Gambar 23. Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Budidaya Kakao**



**Gambar 24. Konsensus Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KNI) Bidang Peronggasan**

### 3) Layanan Internal (Overhead)

Layanan Internal (Overhead) merupakan fasilitasi prasarana dan sarana pendukung kelembagaan pelatihan ditujukan pada UPT Pelatihan Pertanian Pusat yang ditetapkan untuk pengembangan laboratorium, Pusat Inkubasi Agribisnis (PIA), dan retribusi gedung.

### 4) Layanan Pendidikan dan Pelatihan

Layanan Pendidikan dan Pelatihan merupakan fasilitasi kegiatan operasional pada Kegiatan Perantaraan Sistem Pelatihan Pertanian (PSP-3) yang ditujukan untuk mendukung dan memperlancar operasional.

### 5) Fasilitasi dan klasifikasi kelembagaan pelatihan petani (P4S)

Fasilitas kelembagaan pelatihan petani (P4S) didukung oleh kegiatan

na) Menghantar PNS Berprestasi

dan Pengantar Seleksi dan

na) Pemberi Lyceum 5 TM melalui kegiatan bagi Petani di  
PNS



Gambar 14. Pengemhangan Petani Muda yang  
Berjiwa Wirasaha (entrepreneur)  
Melalui Pelatihan Pertanian dan  
Pedesaan Swadaya (PNS)

**6) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia pertanian di wilayah perbatasan melalui replikasi KEAD**

Program KEAD bertujuan untuk memperbaiki mata pencarian kaum miskin pedesaan secara berkelompok, acuan tujuan yang hendak dicapai adalah pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan perbaikan pengelolaan sumber daya alam di 30 (tiga puluh) desa sasaran di provinsi Kalimantan Barat dan provinsi NDI

Perbandingan realisasi dengan target sasaran kegiatan utama Pemanjapan Sistem Pelatihan Tahun 2017 disajikan pada Tabel 9.

**Tabel 13.**  
**Target dan Realisasi Kegiatan**  
**Pemanjapan Sistem Pelatihan Pertanian Tahun 2017**

NO	RENCANA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1	Jumlah Aparatur Pertanian Yang Terlatih	12.619 orang	12.674 orang	100,44
2	Peningkatan kompetensi non aparatur pertanian melalui pelatihan	14.604 orang	14.556 orang	99,62
3	Jumlah Aparatur dan Non Aparatur Pertanian Yang Diserifikasi	934 orang	905 orang	96,89
4	UPT Pelatihan yang Terfasilitasi Sarana dan Prasarana Pembelajaran	10 unit	10 unit	100,00
5	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Pertanian	1 unit	1 unit	100,00
6	Jumlah Layanan Internet Overhead	658 unit	658 unit	100,00
7	Jumlah Layanan Persebaran dan Pelatihan	186 unit	187 unit	100,54

**d) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya**

Caraan kegiatan utama Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya didukung oleh beberapa kegiatan, yaitu:

- 1) **Bagian Perencanaan** Bagian Perencanaan bertugas melaksanakan penyusunan rencana dan program peningkatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi: (a) persiapan penyusunan rencana dan program, (b) program kerjasama, dan (c) persiapan penyusunan anggaran.
- 2) **Bagian Keuangan dan Perencanaan** Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan perencanaan. Dasar 3 Rencana Sekretariat Badan PPSIDMP 2015 – 2019 melaksanakan tugas, Bagian Keuangan dan Perencanaan menyelenggarakan fungsi: (a) pelaksanaan urusan mahendhaharum, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan persiapan pengujian dan penyetoran surat perintah pembayar (SPM), (b) pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi anggaran, dan (c) pelaksanaan urusan perlengkapan.



Gambar 25. Workshop Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Semester II TA 2017

- 3) Bagian Umum: Bagian Umum mempunyai tugas penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyempurnaan organ sus. dan tata laksana, serta pengelolaan urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi, (a) penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana; (b) pelaksanaan urusan kepegawaian, dan (c) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga



**Gambar 26. Pertemuan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Lingkup Badan PPSDMP**

- 4) bagian evaluasi dan Pelaporan: Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data-informasi sumber daya manusia dan keterampilan pertanian, penyajian evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan hubungan

masyarakat dan informasi publik. Dalam melaksanakan tugas, Badan Evaluasi dan Penilaian menyelenggarakan tugas: (a) menyiapkan data, menyiapkan analisis, pertanggung jawaban dan evaluasi pelaksanaan program; (b) menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan dan tindak lanjut hasil pengurusan di bidang penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian; dan (c) menyiapkan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan perpustakaan.



Gambar 27. Rapat Pimpinan Badan PPSDMP



**Gambar 28. Pertemuan Rekonsiliasi dan Konsolidasi Monitoring Evaluasi Lingkup Badan PPSDMP Tahun 2017**



**Gambar 29. Workshop Medsos Tahun 2017**

- 5) Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara rinci realisasi pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan PPSDMP selama Tahun 2017 tersaji pada Tabel 10.

**Tabel 10.**  
**Target dan Realisasi Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan PPSDMP Tahun 2017**

No.	Rencana Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Perencanaan Program, Kegiatan Anggaran dan Kegiatan Penyusunan dan Penganggaran SDM Pertanian (dokumen)	39	39	100,00
2.	Dokumen Kelengkapan dan Perlengkapan yang dibutuhkan	24	24	100,00
3.	Dokumen Perundang-undangan, Keputusan dan Surat Keputusan yang dibutuhkan	13	13	100,00
4.	Dokumen Data dan Evaluasi, Pelebaran, Keterser dan Pengalihan yang dibutuhkan	21	21	100,00
<b>Total (dokumen)</b>		<b>97</b>	<b>97</b>	<b>100,00</b>

## BAH IV. PERMASALAHAN DAN UPAYA TINDAK LANJUT

### A. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan Badan PPSD&P pada tahun 2017 adalah pada masing-masing kegiatan utama secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Pusat Penyuluhan Pertanian

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian selama tahun 2017, permasalahan yang dihadapi dalam penyiapan sistem penyuluhan pertanian sebagai berikut:

##### 1) Belum Optimalnya Sistem Penyuluhan

Belum optimalnya sistem penyuluhan pertanian tersebut, antara lain disebabkan oleh berbagai persoalan, yaitu: (a) kebijakan dibanding penyuluhan pertanian belum sepenuhnya terjangkau sampai dengan lapangan, (b) kurangnya sosialisasi dan advokasi terhadap regulasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian, (c) rendahnya sinergitas antara dinas teknis, kelembagaan penyuluhan dan BPDP, (d) belum optimalnya dukungan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penyuluhan baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota, dan (e) belum optimalnya peran kelompok petani penyuluhan di setiap kabupaten/wilayah.

##### 2) Belum Optimalnya Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

Penyelenggaraan penyuluhan pertanian belum optimal karena belum mampu mewujudkan pelaku usaha dan pelaku usaha yang profesional, kreatif, inovatif, berorganisasi, bisnis, dan berwawasan global dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pangan, nilai tambah

eksper, dan kesejahteraan petani. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian belum optimal, antara lain disebabkan oleh (a) belum optimalnya kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan (BPJK), (b) rendahnya kapasitas petani, (c) belum optimalnya jumlah dan kompetensi penyuluh pertanian, (d) belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana serta pembiayaan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, dan (e) belum optimalnya diseminasi teknologi melalui berbagai saluran dan media.

### 3) Rendahnya Luas Kepemilikan Lahan Petani

Salah satu isu penting yang terkait dengan alokasi lahan di Indonesia yaitu rendahnya kepemilikan lahan oleh sebagian besar petani (54%) dengan luas garapan kurang dari 0,5 ha, sehingga akan sulit untuk mencapai skala usaha yang ekonomis.

### 4) Terbatasnya Aksesibilitas Petani terhadap Permodalan, Informasi dan Teknologi

Sebagian besar petani masih mengalami kesulitan dalam mengakses permodalan usaha, informasi, teknologi dan infrastruktur sehingga mengakibatkan rendahnya produktivitas. Kondisi ini berdampak pada sulitnya pengembangan/peluasan agribisnis.

### 5) Jumlah dan Kompetensi Tenaga Penyuluh Belum Memadai

Jumlah Penyuluh Pertanian PNS yang ada masih jauh dari kebutuhan pelayanan penyuluhan yaitu satu desa satu penyuluh, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Saat ini Penyuluh Pertanian PNS yang mendekati usia pensiun mencapai 49%. Pemantauan

jumlah penyuluh tidak berpengaruh pada jangkauan jumlah petani yang difasilitasi. Rendahnya insentif bagi penyuluh dan adanya tawaran jabatan lain seiring dengan penerapan otonomi daerah menyebabkan banyak penyuluh yang beralih status/jabatan.

**6) Belum Berkembangnya Kemitraan Usaha antara Pelaku Utama dengan Pelaku Usaha**

Kemitraan usaha antara pelaku utama dan pelaku usaha belum optimal, sehingga hasil usahatani belum maksimal. Pelaku utama dan pelaku usaha pada umumnya masih berusaha secara individual, belum mengarah pada bentuk badan usaha. Dengan kondisi ini, petani akan sulit mengembangkan jejaring kerjasama usaha dan pengembangan usaha.

**7) Lambatnya Alih Teknologi dan Informasi**

Latar belakang pendidikan petani yang rendah mempengaruhi tingkat adopsi teknologi dan informasi. Petani dengan tingkat pendidikan rendah pada umumnya memiliki dasar pengetahuan yang kurang memadai untuk mencerna informasi atau pengetahuan karena kurang mampu mengakses informasi. Kondisi ini menyebabkan hilangya peluang usaha yang menguntungkan bagi petani.

**8) Rendahnya Kapasitas Petani dalam Kewirausahaan**

Pemahaman petani dalam aspek kewirausahaan masih terbatas, antara lain kemampuan untuk melihat dan merespon peluang pasar, menyusun rencana usaha kegiatan (RUK), dan memenuhi permintaan pasar. Kelemahan ini menyebabkan sebagian busu baru sekedar menjual hasil komoditas tanpa melakukan perlakuan khusus untuk meningkatkan nilai tambah, meningkatkan skala usaha.

serta kalangan menengah untuk memaksimalkan pengembangan usaha dan pendapatan dan komeditas yang dibelakannya.

9) **Rendahnya Kapasitas Kelembagaan Petani**

Rendahnya kapasitas kelembagaan petani menyebabkan pelaksanaan budingnya belum optimal sehingga mengakibatkan posisi pasar rendah dan sulit melakukan kemitraan usaha dengan pelaku usaha.

10) **Belum Berkembangnya Kelembagaan Ekonomi Petani**

Selagian besar kelembagaan petani dalam berusaha tani masih bersifat individual, belum berorientasi pasar. Banyak kelembagaan petani dipraktkan kelompok tani yang belum bisa dikatakan mampu berkembang menjadi kelembagaan ekonomi petani, karena utamanya jiwa kewirausahaan petani yang masih rendah. Demikian juga kemampuan manajerial dan kepemimpinan serta organisasi bisnis masih rendah.

2. **Pusat Pendidikan Pertanian**

Beberapa permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan Pusat Pendidikan Pertanian pada Tahun 2017 adalah meliputi:

- 1) Tidak tercapainya anggaran sesuai target atau realisasi (100%) atau lain karena belum optimalnya koordinasi antara penanggung jawab teknis,
- 2) Belum sempurnanya dukungan pendukung pelaksanaan kegiatan dan anggaran (ICR, KAS, dan lain-lain) sehingga menghambat proses pelaksanaan kegiatan dan realisasi setiap anggaran.
- 3) Pembinaan/pemantauan di semester keuangan kegiatan terkadang tidak segera dilaksanakan bersama dengan selesainya pelaksanaan kegiatan sehingga mengakibatkan

selanjutnya penyelesaian administrasi keuangan.

- 4) Pelaporan-pelaporan kegiatan yang tidak langsung dibuat sehingga lambanya dalam penyusunan laporan kegiatan;
- 5) Terjadinya perubahan kebijakan antara lain adanya perubahan output dan output yang tidak disesuaikan dengan anggaran.

### 3. Pusat Pelatihan

- 1) Jumlah dan kualitas kinerjanya kapasitas dan kompetensi, widyawan dan tenaga kebidanan masih belum memadai;
- 2) Dukungan personal dan sarana kebidanan (sarana, kelengkapan, sarana praktik) belum optimal;
- 3) Efektivitas pelaksanaan kegiatan pelatihan masih rendah;
- 4) Keterbatasan mutu layanan kebidanan berdasarkan ISO belum tercapai.

### 4. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

- 1) Pencapaian efisiensi dalam perencanaan program dan anggaran masih belum konsisten;
- 2) Kualitas pelayanan ketidaksihan informasi publik belum prima;
- 3) Efektivitas dan akuntabilitas kegiatan serta pengendalian internal masih rendah;
- 4) Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan pegawai belum sepenuhnya optimal dan berkesinambungan;
- 5) Pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan, sehingga hasilnya belum optimal.

## H. Upaya Tindak Lanjut

Dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan dan kendala tersebut akan ditempuh upaya sebagai berikut:

## 1. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian

- a. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait sehingga program/kegiatan menjadi sejalar / sinkron,
- b. Pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang agar disesuaikan dengan jadwal kalender tanam,
- c. Pada tahun-tahun mendatang diharapkan tidak terjadi revisi anggaran serta rencana tingkat pusat sehingga kegiatan dapat dilaksanakan pada awal tahun atau di bulan Januari dan sesuai target/waktu yang telah ditetapkan,
- d. Pada tahun-tahun mendatang adanya kegiatan APBNP tidak akan mengganggu atau merubah kegiatan APBN yang sedang berjalan;
- e. Diharapkan adanya tambahan personel baik PNS ataupun THH di daerah agar kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan;
- f. Pada tahun-tahun mendatang diharapkan para pelaksana kegiatan mengikuti ROK atau jadwal palang yang telah disepakati.
- g. Melakukan koordinasi antara Dinas Teknis dengan Bakorluh dalam penentuan CP/KL ,
- h. Pengangkatan THH-TPP menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan memberdayakan penyuluh pertanian swadaya dalam pengawasan dan pendampingan di lokasi sentra produksi pangan.
- i. Melakukan optimalisasi data system manajemen penyuluhan pertanian (SIMLUHITAN) yang meliputi: data kelembagaan petani (Paktan dan Gapoktan), kelembagaan penyuluhan (Bakorluh, Bagelluh dan BPP Kecamatan) dan ketragean penyuluhan (TNS, THH-TPP dan swadaya).

## 2. Pemantapan Sistem Pendidikan Tinggi Pertanian

- a. Proses transformasi kelembagaan pendidikan STPP menjadi Politeknik diluncurkan pada tahun 2017;
- b. Revitalisasi pendidikan menengah pertanian dengan lebih

meningkatkan kebutuhan pasar (demand driven) di tahun 2017;

- c. Penataan guru dan dosen sesuai dengan kualifikasinya;
- d. Adanya peningkatan profesionalisme guru dan dosen melalui pendidikan, pelatihan, magang, studi banding, dan pertemuan lainnya;
- e. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor bidang pendidikan pertanian;
- f. Melengkapi sarana dan prasarana pendidikan di UPT

### 3. Pendidikan Menengah Pertanian

- a. Meningkatkan sosialisasi keberadaan Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian kepada masyarakat serta merangkul SMK Pertanian yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana, seperti kelas, laboratorium dan sarana lainnya yang mendukung penambatan kompetensi keahlian;
- c. Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dalam rangka pemerataan tenaga pendidik yang kompeten serta mengusulkan tambahan tenaga pendidik yang kompeten;
- d. Pertanya fasilitasi dalam mengamankan aset SMK-PP.

### 4. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian

- a. Kualitas tenaga kediklatan (Widyaiswara sebagai fasilitator, Penyuluh Pertanian PNS dan Swadaya, dosen serta praktisi) masih perlu ditingkatkan secara berjenjang melalui diklat kompetensi dan sertifikasi, serta kemampuan penguasaan Bahasa Inggris, sehingga kemampuan mentransfer pengetahuan kepada peserta diklat lebih variatif, inovatif, dan efektif, serta mampu bersaing dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2017;

- b. Pelaksanaan IKL dan AKL perlu ditingkatkan kualitasnya, sehingga diklat yang dilaksanakan dapat memenuhi kebutuhan peserta Diklat dan efektif.
  - c. Kualifikasi diklat perlu disesuaikan dan dipadukan sesuai dengan jenis Diklat sesuai IKL dan AKL dalam mendukung pengembangan produksi & konsolidasi strategi, agar mampu dan mampu-capaian tercapai secara efektif dan dapat diterapkan.
3. **Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya.**
- a. Perencanaan kegiatan dan anggaran yang partisipatif dalam menghadapi adanya kebijakan penghematan.
  - b. Melakukan upaya pengendalian Pengelolaan Berorientasi Negara Bukar Pajak (PNBP) yang masih terdapat kelemahan dalam pencatatan dan penanaman-pajak PNBP and setke Badan PPSCMP.
  - c. Rencana RKI dan RKI perlu ditelaah kembali dan disinkronkan dalam LAKIP.
  - d. Memperkaya analisis hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sehingga dapat memberikan penjelasan dasar strategis faktor keberhasilan atau kegagalan dan memberikan rekomendasi atau solusi perbaikan.
  - e. Melakukan pemantauan PK secara periodik dan mengoptimalkan koordinasi, sinkronisasi antara bagian yang menangan periklanan, bagian yang menangan pelaksanaan, dan bagian yang menangan evaluasi.
  - f. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan BPPSCMP dan UPT, maka direkomendasikan agar: 1) Mengembangkan kueria Tim Kerja PI, 2) Perlu adanya "knowledge sharing" tentang SPI dengan melibatkan masyarakat dan lain seperti Tim Prubwa SPI dan SPK, BPPK; 3) Perlu sosialisasi dan forum-studi dengan melibatkan seluruh pegawai; 4) Menetapkan kueria salah PI dalam

- kuruk kinerja pimpinan Sasaran Kerja Pegawai (SKP):
- g. Dalam rangka mengoptimalkan proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (a) menguji And ter dijen. DPK, HPK.P) dan mengklasifikasi jenis (1) penyelesaian ketetapan negara pada satek baru melalui forum pertemuan dengan pendampingan Dan Kementerian dan HPK.P Pusat, (2) mengirimkan surat pemberitahuan kepada Gubernur-Bupati Walikota untuk menindaklanjuti penyelesaian temuan Kerugian Negara pada Satek Desentralisasi-Tugas Pembantuan yang sulit ditindaklanjuti, (3) pembinaan melalui kegiatan kunjungan pada satek yang terdapat temuan yang belum tuntas; (4) membuat surat edaran kepala And ter kepada pimpinan satek tentang temuan temuan And ter secara administrasi maupun teknis untuk dapat segera menindaklanjuti hingga tuntas, (5) menyampaikan ke satek tentang peraturan jangka waktu penyelesaian hasil pemeriksaan (6) memberikan saran ke satek terkait Badan PPSDMP tentang prosedur satek administrasi berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 sebagai penyebab kerugian negara atau instansi dan pimpinan sateknya yang tidak mau menindaklanjuti untuk penagihan atau penyelesaian kerugian negara tersebut.
  - h. Dilakukan pelaksanaan Pengendalian Intern Lingkup Badan PPSDMP secara periodik, dimulai dengan penyusunan dan pengakutuan Satek, sosialisasi manualisasi dan profilisasi, supervisi dan pembinaan.

## BAB V PENUTUP

Badan Penyelidikan dan Pengembangan SDM Pertanian dalam mendukung ekonomi dan bangsa pendidikan. Tahun 2017, tugas tersebut diwujudkan melalui Program Peningkatan Penyelidikan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian serta Kegiatan Produktif Menengah Pertanian. Kegiatan utama yang dilaksanakan meliputi: (1) Pemanfaatan Sistem Penyulutan Pertanian, (2) Revitalisasi Pendidikan Pertanian, (3) Penelitian Menengah Pertanian, (4) Pemanfaatan Sistem Pelatihan Pertanian, serta (5) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya.

Realisasi setiap anggaran program dan kegiatan Badan PPSDMP pada tahun 2017, secara menyeluruh mencapai 92,33%, yaitu sebesar Rp 1.153.068.854.691,- dari total alokasi pagu anggaran sebesar Rp 1.247.410.430.000,-.

Pencapaian realisasi fisik kegiatan RPPSDMP pada tahun 2017 adalah sebesar pada kisaran 84,6% - 96,9%. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Badan PPSDMP didukung oleh satker pusat: 20 Satker Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat, 34 Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Pemerintahan Daerah di Tingkat Provinsi, Dinas Badan. Selain itu, dukungan dan berbagai pemangku kepentingan lain juga menjadi salah satu faktor kunci pencapaian kegiatan pada tahun 2017.

Dalam pelaksanaan setiap kegiatan utama mempunyai permasalahan/kendala dan telah direkomendasikan tindak lanjut yang harus dilakukan sebagai solusi permasalahan tersebut. Hal ini yang disampaikan dalam Laporan Tahunan ini menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pengembangan SDM Pertanian mendatang.

## LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi Badan PPSDMP



Lampiran 2 Data Kepegawaian Badan PPSIDMP



**DISTRIBUSI PECAWAJ BAHAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM Pertanian  
BERDASARKAN JENIS KELAMIN  
PER 11 DESEMBER 2017**

No	Unit Kerja	Jumlah Suku		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	Batalyon PPSDAP	1	0	1
2	Sekretariat Badan	98	58	156
3	Pusat Penyuluhan Pertanian	11	29	40
4	Kusat Penelitian dan Pengujian	17	24	41
5	Pusat Penelitian Pertanian	21	25	47
6	Pusat Penelitian Manajemen Dan Administrasi Pertanian	109	51	160
7	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan	40	36	76
8	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor	108	41	149
9	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang	179	36	215
10	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang	115	42	157
11	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa	75	30	105
12	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manado	42	21	63
13	Biro Besar Pelatihan Pertanian Lembang	71	46	117
14	Biro Besar Pelatihan Kesehatan Peternak Lembang	47	21	68
15	Biro Besar Pelatihan Peternak Batu	60	27	87
16	Biro Besar Pelatihan Pertanian Kerinci	52	30	82
17	Biro Besar Pelatihan Pertanian Karanganyar	59	27	86
18	Biro Besar Pelatihan Pertanian Sukoharjo	43	17	60
19	Biro Besar Pelatihan Peternakan Kupang	44	18	62
20	Biro Besar Pelatihan Pertanian Jambi	56	24	80
21	Biro Pelatihan Pertanian Lampung	41	21	62
22	SATK Pertanian Pembangunan Negeri Tembung	38	23	61
23	SATK Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru	48	17	65
24	SATK Pertanian Pembangunan Negeri Kupang	26	9	35
TOTAL PECAWAJ (Maka)		1.015	744	1.759

Batara, Desember 2017  
 J. Kepala Bagian Umum  
 Kepala Subbagian Kepegawaian

SK Himpun: 54.000  
 MR: 19617/01/12/2017/2001





**REKAPITULASI DATA KEMERDEKAAN PERUSAHAAN DAN PERUMAHAN  
PILIHAN MELAKUKAN/CIPTAKAN PERUSAHAAN  
TAHAP II PERMULAAN 2017**

No	Kategori	Jumlah				Persentase			
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	Jumlah Calon Pemilik	10	100	10	100	10	100	10	100
2	Indikator Utama	10	100	10	100	10	100	10	100
3	Supaya dapat memulai kegiatan usaha	10	100	10	100	10	100	10	100
4	Perencanaan awal kegiatan usaha	10	100	10	100	10	100	10	100
5	Perencanaan awal kegiatan usaha	10	100	10	100	10	100	10	100
6	Menentukan jenis usaha/kegiatan yang akan dijalankan	10	100	10	100	10	100	10	100
7	Menentukan lokasi usaha/kegiatan yang akan dijalankan	10	100	10	100	10	100	10	100
8	Menentukan modal yang diperlukan untuk memulai usaha	10	100	10	100	10	100	10	100
9	Menentukan tenaga kerja yang diperlukan untuk memulai usaha	10	100	10	100	10	100	10	100
10	Menentukan jenis usaha/kegiatan yang akan dijalankan	10	100	10	100	10	100	10	100
11	Menentukan lokasi usaha/kegiatan yang akan dijalankan	10	100	10	100	10	100	10	100
12	Menentukan modal yang diperlukan untuk memulai usaha	10	100	10	100	10	100	10	100
13	Menentukan tenaga kerja yang diperlukan untuk memulai usaha	10	100	10	100	10	100	10	100
14	Menentukan lokasi usaha/kegiatan yang akan dijalankan	10	100	10	100	10	100	10	100
15	Menentukan modal yang diperlukan untuk memulai usaha	10	100	10	100	10	100	10	100
16	Menentukan tenaga kerja yang diperlukan untuk memulai usaha	10	100	10	100	10	100	10	100
17	Menentukan lokasi usaha/kegiatan yang akan dijalankan	10	100	10	100	10	100	10	100
18	Menentukan modal yang diperlukan untuk memulai usaha	10	100	10	100	10	100	10	100
19	Menentukan tenaga kerja yang diperlukan untuk memulai usaha	10	100	10	100	10	100	10	100
20	Menentukan lokasi usaha/kegiatan yang akan dijalankan	10	100	10	100	10	100	10	100
21	Menentukan modal yang diperlukan untuk memulai usaha	10	100	10	100	10	100	10	100
22	Menentukan tenaga kerja yang diperlukan untuk memulai usaha	10	100	10	100	10	100	10	100
23	Menentukan lokasi usaha/kegiatan yang akan dijalankan	10	100	10	100	10	100	10	100
24	Menentukan modal yang diperlukan untuk memulai usaha	10	100	10	100	10	100	10	100

Survei dan Pengumpulan Data  
Kategori Pengusaha Pemula  
Kategori Pengusaha Pemula